



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 1-b TAHUN 2013**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Acara Negara Tahun 2011 Nomor 491);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi kepentingan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur/pengecer resmi di Lini IV. Jenis pupuk subsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda). SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan ternak dan Budidaya Ikan dan/atau Udang.
14. Petani adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Pembudidaya ikan atau Udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
18. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik di dalam Negeri.
19. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja

sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
25. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kabupaten/Kota

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2013.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1), dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator BPP setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.

Pasal 4

Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di satu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri dari pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen,

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur resmi Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai suatu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten Lamandau.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Pupuk Urea =Rp.1.800; per Kg;
 - Pupuk SP-36 =Rp.2.000; per Kg;
 - Pupuk ZA =Rp. 1.400; per Kg;
 - Pupuk NPK =Rp. 2.300; per Kg;
 - Pupuk Organik =Rp.500; per Kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur resmi Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- Pupuk Urea =50 Kg;
 - Pupuk SP-36 =50 Kg;
 - Pupuk ZA =50 Kg;
 - Pupuk NPK =50 Kg atau 20 Kg;
 - Pupuk Organik =40 Kg atau 20 Kg.

Pasal 10

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"**

Barang Dalam Pengawasan

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Lamandau wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Koordinator BPP, Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Lamandau wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i> L.
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2-1-2013



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2-1-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 275.b

Lampiran I Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR

(Ton)

Sub Sektor	Jenis Pupuk				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
- Tanaman Pangan	144.14	29.52	96.47	1,324.61	76.80
- Hortikultura	21.39	21.30	2.18	71.94	3.84
- Perkebunan Rakyat	386.00	97.60	14.85	62.62	18.37
- Peternakan	6.68	-	-	6.01	-
- Perikanan Budidaya	15.12	1.42	-	3.50	0.17
JUMLAH	573.33	149.84	113.50	1,468.68	99.18

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



Lampiran II Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

(Ton)

No	Jenis Pupuk/Sektor/ Sub Sektor	Kebutuhan Pupuk Setiap Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
I.	UREA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	2.54	3.01	2.78	69.27	11.83	8.26	4.92	8.26	4.92	8.26	8.26	11.83	144.14
	- Hortikultura	2.14	2.14	3.20	2.14	1.07	2.14	1.07	1.07	1.07	2.14	2.14	1.07	21.39
	b. Perkebunan	29.00	29.00	30.00	29.00	29.00	29.00	31.50	31.50	33.00	38.00	38.00	39.00	386.00
	c. Peternakan	0.83	0.42	0.42	0.42	0.42	0.83	0.42	0.42	0.42	0.83	0.83	0.42	6.68
	d. Perikanan Budidaya	1.44	1.44	2.16	1.44	1.44	1.44	0.72	0.72	0.72	1.44	1.44	0.72	15.12
	Jumlah	35.95	36.01	38.56	102.27	43.76	41.67	38.63	41.97	40.13	50.67	50.67	53.04	573.33
II.	SP-36													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	2.57	3.85	3.85	1.28	2.57	1.28	1.28	2.57	2.57	1.28	3.85	2.57	29.52
	- Hortikultura	1.01	1.01	2.03	2.03	1.01	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	21.30
	b. Perkebunan	8.13	8.14	8.14	8.14	8.14	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	97.60
	c. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Perikanan Budidaya	0.20	-	0.80	-	-	0.42	-	-	-	-	-	-	1.42
	Jumlah	11.91	13.00	14.82	11.45	11.72	11.86	11.44	12.73	12.73	11.44	14.01	12.73	149.84
III.	ZA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	7.65	6.66	16.17	-	16.17	-	-	-	13.19	13.19	11.72	11.72	96.47
	- Hortikultura	-	-	0.54	0.55	0.54	-	-	0.55	-	-	-	-	2.18
	b. Perkebunan	2.70	2.70	1.35	1.35	-	2.70	-	1.35	-	2.70	-	-	14.85
	c. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.35	9.36	18.06	1.90	16.71	2.70	-	1.90	13.19	15.89	11.72	11.72	113.50

No	Jenis Pupuk /Sektor / Sub Sektor	Kebutuhan Pupuk Setiap Bulan												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
IV.	NPK													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	112.29	108.48	112.29	108.48	114.19	108.48	112.29	108.48	108.48	108.48	108.48	114.19	1,324.61
	- Hortikultura	4.00	4.00	4.00	4.00	7.99	4.00	4.00	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	71.94
	b. Perkebunan Rakyat	5.01	7.51	2.51	2.51	5.01	7.51	2.51	7.51	7.51	2.51	7.51	5.01	62.62
	c. Peternakan	0.48	0.72	0.24	0.24	0.48	0.72	0.24	0.72	0.72	0.24	0.72	0.49	6.01
	d. Perikanan Budidaya	0.28	0.42	0.14	0.14	0.28	0.42	0.14	0.42	0.42	0.14	0.42	0.28	3.50
	Jumlah	122.06	121.13	119.18	115.37	127.95	121.13	119.18	125.12	125.12	119.36	125.12	127.96	1,468.68
V.	ORGANIK													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	4.66	4.66	4.66	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	76.80
	- Hortikultura	0.21	0.21	0.21	0.21	0.43	0.21	0.21	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	3.84
	b. Perkebunan	2.62	2.62	2.62	2.62	-	2.63	-	2.63	-	2.63	-	-	18.37
	c. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Perikanan Budidaya	0.01	-	0.03	-	0.07	0.06	-	-	-	-	-	-	0.17
	Jumlah	7.50	7.49	7.52	9.81	7.48	9.88	7.19	10.04	7.41	10.04	7.41	7.41	99.18

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	A
SETDA	L
ASISTEN	T
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran III Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: TANAMAN PANGAN

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.24	0.25	0.30	5.00	1.00	1.00	0.75	1.26	0.50	1.00	1.00	2.08	14.38
2. Bulik Timur	0.75	0.25	0.30	10.00	2.00	1.50	0.75	1.25	0.75	1.00	1.70	2.00	22.25
3. Menthobi Raya	0.25	0.75	0.50	15.00	1.33	1.50	1.00	1.50	1.00	2.00	2.00	2.25	29.08
4. Sematu Jaya	0.25	0.75	0.68	20.00	2.50	1.76	1.42	1.75	1.42	2.50	2.00	2.25	37.28
5. Belantikan Raya	0.25	0.50	0.50	10.00	1.50	1.00	0.25	1.25	0.50	1.00	1.00	2.00	19.75
6. Lamandau	0.50	0.25	0.25	5.00	2.00	1.00	0.50	0.75	0.50	0.26	0.16	1.00	12.17
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	2.27	0.50	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.10	3.87
8. Delang	0.30	0.26	0.25	2.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.15	5.36
Kabupaten Lamandau	2.54	3.01	2.78	69.27	11.83	8.26	4.92	8.26	4.92	8.26	8.26	11.83	144.14

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	ARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran IV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.25	0.25	0.75	0.25	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	3.00
2. Bulik Timur	0.25	0.25	0.25	0.25	0.17	0.25	0.17	0.17	0.17	0.25	0.25	0.17	2.60
3. Menthobi Raya	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	4.50
4. Sematu Jaya	0.64	0.64	1	0.64	0.2	0.64	0.2	0.2	0.2	0.64	0.64	0.2	5.84
5. Belantikan Raya	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.30
6. Lamandau	0.1	0.1	0.2	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.05	1.05
7. Batang Kawa	0.1	0.1	0.2	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.05	1.05
8. Delang	0.1	0.1	0.2	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.05	1.05
Kabupaten Lamandau	2.14	2.14	3.20	2.14	1.07	2.14	1.07	1.07	1.07	2.14	2.14	1.07	21.39

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran V Peraturan Bupati Lamandau
 Nomor :
 Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : PERKEBUNAN

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	54.00
2. Bulik Timur	3.00	3.00	3.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.00	3.00	4.00	40.00
3. Menthobi Raya	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50	5.00	6.00	6.00	6.00	56.00
4. Sematu Jaya	3.50	3.50	4.50	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	53.50
5. Belantikan Raya	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	55.00
6. Lamandau	3.50	3.50	3.50	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	43.50
7. Batang Kawa	3.50	3.50	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	40.50
8. Delang	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	4.00	4.00	43.50
Kabupaten Lamandau	29.00	29.00	30.00	29.00	29.00	29.00	31.50	31.50	33.00	38.00	38.00	39.00	386.00

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KASBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



Lampiran VI Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : PETERNAKAN

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.06	0.88
2. Bulik Timur	0.15	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15	0.07	0.07	0.07	0.15	0.15	0.07	1.16
3. Menthobi Raya	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.06	0.88
4. Sematu Jaya	0.15	0.06	0.06	0.06	0.06	0.15	0.06	0.06	0.06	0.15	0.15	0.06	1.08
5. Belantikan Raya	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	0.10	0.04	0.04	0.04	0.10	0.10	0.04	0.72
6. Lamandau	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.52
7. Batang Kawa	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.52
8. Delang	0.13	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	0.05	0.05	0.05	0.13	0.13	0.05	0.92
Kabupaten Lamandau	0.83	0.42	0.42	0.42	0.42	0.83	0.42	0.42	0.42	0.83	0.83	0.42	6.68

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KASUBDAG	
PELAKSANA	



Lampiran VII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

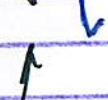
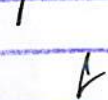
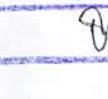
KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: PERIKANAN BUDIDAYA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.24	0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	0.10	0.10	0.10	0.24	0.24	0.10	2.34
2. Bulik Timur	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	0.10	0.25	0.25	0.10	2.35
3. Menthobi Raya	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	0.10	0.25	0.25	0.10	2.55
4. Sematu Jaya	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	0.10	0.25	0.25	0.10	2.55
5. Belantikan Raya	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.12	0.12	0.12	0.25	0.25	0.12	2.53
6. Lamandau	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	1.10
7. Batang Kawa	0.05	0.05	0.20	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.75
8. Delang	0.05	0.05	0.20	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10	0.95
Kabupaten Lamandau	1.44	1.44	2.16	1.44	1.44	1.44	0.72	0.72	0.72	1.44	1.44	0.72	15.12

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran VIII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.25	0.50	0.50	0.15	0.25	0.15	0.15	0.25	0.25	0.15	0.50	0.25	3.35
2. Bulik Timur	0.32	0.50	0.50	0.15	0.32	0.15	0.15	0.32	0.32	0.15	0.50	0.32	3.70
3. Menthobi Raya	0.50	0.75	0.75	0.20	0.50	0.20	0.20	0.50	0.50	0.20	0.75	0.50	5.55
4. Sematu Jaya	0.50	0.75	0.75	0.20	0.50	0.20	0.20	0.50	0.50	0.20	0.75	0.50	5.55
5. Belantikan Raya	0.25	0.50	0.50	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.50	0.25	3.55
6. Lamandau	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	2.80
7. Batang Kawa	0.25	0.10	0.10	0.08	0.25	0.08	0.08	0.25	0.25	0.08	0.10	0.25	1.87
8. Delang	0.25	0.50	0.50	0.10	0.25	0.10	0.10	0.25	0.25	0.10	0.50	0.25	3.15
Kabupaten Lamandau	2.57	3.85	3.85	1.28	2.57	1.28	1.28	2.57	2.57	1.28	3.85	2.57	29.52

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran IX Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.10	0.10	0.25	0.25	0.10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	2.55
2. Bulik Timur	0.12	0.12	0.50	0.50	0.12	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.86
3. Menthobi Raya	0.20	0.20	0.50	0.50	0.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.10
4. Sematu Jaya	0.25	0.25	0.50	0.50	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.25
5. Belantikan Raya	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.96
6. Lamandau	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.20
7. Batang Kawa	0.08	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.69
8. Delang	0.08	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.69
Kabupaten Lamandau	1.01	1.01	2.03	2.03	1.01	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	21.30

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran X Peraturan Bupati Lamandau
 Nomor :
 Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : PERKEBUNAN

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	1.50	2.50	1.63	1.50	2.50	1.63	1.50	2.50	1.63	1.50	2.50	1.63	22.52
2. Bulik Timur	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.01
3. Menthobi Raya	2.50	1.63	1.50	2.50	1.63	1.50	2.50	1.63	1.50	2.50	1.63	1.50	22.52
4. Sematu Jaya	1.63	1.50	2.50	1.63	1.50	2.50	1.63	1.50	2.50	1.63	1.50	2.50	22.52
5. Belantikan Raya	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.01
6. Lamandau	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.01
7. Batang Kawa	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.00
8. Delang	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.01
Kabupaten Lamandau	8.13	8.14	8.14	8.14	8.14	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	97.60

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : PETERNAKAN

Kecamatan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Kabupaten Lamandau	1. Bulik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Mentohi Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Sematu Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAGIAN HUKUM	SETDA KABUPATEN LAMANDAU
JABATAN	PARAF
WASUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

 MARUKAN

Lampiran XII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: PERIKANAN BUDIDAYA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
3. Menthobi Raya	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
4. Sematu Jaya	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
6. Lamandau	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
8. Delang	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
Kabupaten Lamandau	0.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran XIII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	1.50	1.00	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.75	1.75	14.84
2. Bulik Timur	1.15	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.75	1.75	14.65
3. Menthobi Raya	1.25	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	2.00	2.00	15.75
4. Sematu Jaya	1.25	1.16	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	2.00	2.00	15.91
5. Belantikan Raya	1.00	1.00	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.50	1.50	13.50
6. Lamandau	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	12.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.50	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	1.22	1.22	9.82
Kabupaten Lamandau	7.65	6.66	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	13.19	13.19	11.72	11.72	96.47

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran XIV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
3. Menthobi Raya	0.00	0.00	0.14	0.15	0.14	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
4. Sematu Jaya	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
6. Lamandau	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
Kabupaten Lamandau	0.00	0.00	0.54	0.55	0.54	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran XV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : PERKEBUNAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.00	1.00	0.35	1.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.05
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	1.70	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.70	0.00	0.50	0.00	0.00	4.90
4. Sematu Jaya	1.00	1.70	0.00	0.35	0.00	1.00	0.00	0.65	0.00	0.50	0.00	0.00	5.20
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70
Kabupaten Lamandau	2.70	2.70	1.35	1.35	0.00	2.70	0.00	1.35	0.00	2.70	0.00	0.00	14.85

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



Lampiran XVI Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: PETERNAKAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Mentobi Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sematu Jaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran XVII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00
2. Bulik Timur	18.00	18.00	18.00	18.00	20.25	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	20.25	220.50
3. Menthobi Raya	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	236.00
4. Sematu Jaya	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
5. Belantikan Raya	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	130.00
6. Lamandau	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	134.00
7. Batang Kawa	4.29	4.00	4.29	4.00	3.00	4.00	4.29	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	46.87
8. Delang	8.00	4.48	8.00	4.48	10.94	4.48	8.00	4.48	4.48	4.48	4.48	10.94	77.24
Kabupaten Lamandau	112.29	108.48	112.29	108.48	114.19	108.48	112.29	108.48	108.48	108.48	108.48	114.19	1,324.61

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]
MARUKAN

Lampiran XVIII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.80	0.80	0.80	0.80	1.40	0.80	0.80	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	13.20
2. Bulik Timur	0.80	0.80	0.80	0.80	1.40	0.80	0.80	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	13.20
3. Menthobi Raya	0.85	0.85	0.85	0.85	1.60	0.85	0.85	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	14.70
4. Sematu Jaya	0.85	0.85	0.85	0.85	1.80	0.85	0.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	15.90
5. Belantikan Raya	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	4.80
6. Lamandau	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	4.80
7. Batang Kawa	0.18	0.18	0.18	0.18	0.35	0.18	0.18	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	3.18
8. Delang	0.12	0.12	0.12	0.12	0.24	0.12	0.12	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	2.16
Kabupaten Lamandau	4.00	4.00	4.00	4.00	7.99	4.00	4.00	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	71.94

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



Lampiran XIX Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: PERKEBUNAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	1.00	4.20	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.01	2.50	0.00	1.50	1.50	13.71
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	3.50
3. Menthobi Raya	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.51	1.01	1.00	1.50	0.00	1.50	1.26	14.78
4. Sematu Jaya	1.00	1.31	0.00	0.00	1.01	2.00	0.00	1.00	2.50	0.00	1.50	1.25	11.57
5. Belantikan Raya	2.01	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	1.00	7.04
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.01	0.00	0.00	3.01
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.51	0.00	7.01
Kabupaten Lamandau	5.01	7.51	2.51	2.51	5.01	7.51	2.51	7.51	7.51	2.51	7.51	5.01	62.62

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KASUBDAG	
PELAKSANA	



Lampiran XX Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : PETERNAKAN

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.10	0.12	0.05	0.05	0.10	0.12	0.05	0.12	0.12	0.05	0.12	0.05	1.05
2. Bulik Timur	0.10	0.12	0.05	0.05	0.10	0.12	0.05	0.12	0.12	0.05	0.12	0.05	1.05
3. Menthobi Raya	0.10	0.16	0.05	0.05	0.10	0.16	0.05	0.16	0.16	0.05	0.16	0.16	1.36
4. Sematu Jaya	0.10	0.16	0.05	0.05	0.10	0.16	0.05	0.16	0.16	0.05	0.16	0.15	1.35
5. Belantikan Raya	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.02	0.30
6. Lamandau	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.02	0.30
7. Batang Kawa	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.02	0.30
8. Delang	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.02	0.30
Kabupaten Lamandau	0.48	0.72	0.24	0.24	0.48	0.72	0.24	0.72	0.72	0.24	0.72	0.49	6.01

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran XXI Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

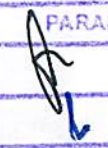
Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : PERIKANAN BUDIDAYA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.05	0.08	0.02	0.02	0.05	0.08	0.02	0.08	0.08	0.02	0.08	0.05	0.63
2. Bulik Timur	0.05	0.08	0.02	0.02	0.05	0.08	0.02	0.08	0.08	0.02	0.08	0.05	0.63
3. Menthobi Raya	0.05	0.10	0.03	0.03	0.05	0.10	0.03	0.10	0.10	0.03	0.10	0.05	0.77
4. Sematu Jaya	0.05	0.10	0.03	0.03	0.05	0.10	0.03	0.10	0.10	0.03	0.10	0.05	0.77
5. Belantikan Raya	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.15
6. Lamandau	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.15
7. Batang Kawa	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.20
8. Delang	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.20
Kabupaten Lamandau	0.28	0.42	0.14	0.14	0.28	0.42	0.14	0.42	0.42	0.14	0.42	0.28	3.50

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran XXII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	1.00	1.00	1.00	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	17.67
2. Bulik Timur	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	16.50
3. Mentobi Raya	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	16.50
4. Sematu Jaya	1.06	1.06	1.06	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	18.93
5. Belantikan Raya	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2.40
6. Lamandau	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2.40
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2.40
Kabupaten Lamandau	4.66	4.66	4.66	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	76.80

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran XXIII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.72
2. Bulik Timur	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.48
3. Menthobi Raya	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.72
4. Sematu Jaya	0.04	0.04	0.04	0.04	0.10	0.04	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.84
5. Belantikan Raya	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.36
6. Lamandau	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.36
7. Batang Kawa	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.18
8. Delang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.18
Kabupaten Lamandau	0.21	0.21	0.21	0.21	0.43	0.21	0.21	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	3.84

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



Lampiran XXIV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor

: PERKEBUNAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.62	1.00	1.00	0.62	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.24
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	1.00	0.62	1.00	1.00	0.00	0.83	0.00	1.33	0.00	0.80	0.00	0.00	6.58
4. Sematu Jaya	1.00	1.00	0.62	1.00	0.00	0.80	0.00	1.30	0.00	0.83	0.00	0.00	6.55
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	2.62	2.62	2.62	2.62	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	18.37

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WASUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

Lampiran XXV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

Sub Sektor : PETERNAKAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Menthobi Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4. Sematu Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



Lampiran XXVI Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

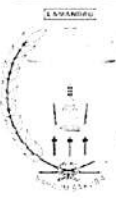
Sub Sektor : PERIKANAN BUDIDAYA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
4. Sematu Jaya	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	0.01	0.00	0.03	0.00	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	A
SETDA	L
ASISTEN	T
KABBAG	
KASUBBAG	V
PELAKSANA	81





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, Februari 2013

K e p a d a

Nomor : 188/23 / II /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Disampaikan dengan hormat :
Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
Dari : Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Kab. Lamandau
Tentang : Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
Dasar : Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau
Tata Naskah : Perbup ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
Lampiran : 1 (satu) lembar
Kesimpulan : 1. Dari isi Perbup tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag. Hukum maka SK ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. Bp. Bupati

*- sudah diteliti
- mohon tanda tangan.*

*L 4
3 13.*

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN LAMANDAU,

Drs. MURIADI, M.Si
NIP. 19690207 199012 1 001